

HAJI DI MASA KOLONIAL: ORDONASI DAN RESOLUSI

Nur Ikhwana Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Email :nurifwana1@gmail.com

Abstrak

Haji pada abad ke 19 merupakan alat untuk mentransmisikan budaya dan doktrin agama. Tantangan yang di hadapi oleh calon jamaah haji yaitu berasal dari bangsa belanda sebagai pengelolah haji. Peraturan yang diterapkan mulai dari sebelum berangkat haji sampai sepulang dari tanah suci sangat mempersulit jamaah. Naiknya status sosial setelah menunaikan haji memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat, Haji memiliki makna dan pengaruh yang signifikan pada abad ke 19 mampu menggerakkan kekuatan sosial dan kultural untuk melawan belanda oleh karena itu belanda membuat peraturan kebijakan khusus terkait ibadah haji yang tujuannya untuk meminilisir jumlah jamaah haji dari indonesia dan pada akhirnya kebijakan tersebut tidak berpengaruh bagi jamaah haji sehingga muncul perlawanan-perlawanan umat Islam yang di pimpin oleh para pemuka agama islam yang bertitel haji. Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi Islam diantara SI. Dibagian Ekonomi dengan adanya ibadah Haji membuat perekonomian meningkat terutama di pelayaran, hal ini dikarenakan masyarakat arab dan inggris banyak yang berdagang di pelayaran pada saat keberangkatan ibadah Haji.

Kata Kunci : Ordonasi, Resolusi, dan Haji

A. Pendahuluan

Haji merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam bagi yang memiliki kemampuan baik dari sisi lahiriah, batiniah, dan juga finansial. Kewajiban pelaksanaan ibadah haji dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Rasulullah saw melaksanakan ibadah Haji selama masa hidupnya hanya sekali yaitu Haji Wada. Pelaksanaan haji dari masa ke masa memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Karena ritual haji sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam *'alaihi Salam*. Hingga sekarang pelaksanaan tersebut masih dilakukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini menjadi menarik dirundungkan karena pada abad ke-20 ini jiwa masyarakat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji semakin bertambah pesat. Perjalanan haji penduduk Indonesia dari era pra kolonial, hingga kemerdekaan menjadi menarik untuk ditelaah kembali. Setiap perbedaan era banyak hal menarik yang ditemukan, dari mulai bagaimana penduduk Indonesia sampai ke Makah, motivasi menunaikan ibadah haji, hingga mengarah kepada pengelolaan haji agar menjadi lebih baik dalam sisi pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan jamaah.

Proses perjalanan ibadah haji dari tanah air menuju Hijaz juga mengundang diskursus yang cukup hangat. Proses perjalanan haji penduduk Indonesia punya caranya tersendiri, dimulai dari cara mempersiapkan diri dari tanah air, pelayaran yang akan digunakan, juga proses pelaksanaan ibadah haji di tanah Hijaz. Menurut Muhammad Nuri (2014) pelaksanaan haji dari masa ke masa punya aturannya sendiri-sendiri sesuai dengan masanya. Namun aturan-aturan yang diberlakukan tersebut dalam proses perjalanan ibadah haji tidak lah cukup untuk memberikan sebuah pelayanan yang komprehensif juga profesional. Melainkan harus ada kesadaran yang tinggi dalam menjalankan aturan tersebut oleh para calon jamaah haji. Selain itu juga proses perjalanan haji bagi setiap muslim, idealnya harus bisa memperbaiki kualitas diri jamaah haji. Menurut Ahmad Baidhowi (2019) saat ini kuantitas jamaah haji jumlahnya sangat besar, tercatat dalam lima belas tahun terakhir jumlah jamaah haji lebih dari tiga juta jamaah. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, seharusnya orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji tersebut mampu meningkatkan moralitas umat Islam menuju kualitas

yang lebih baik Perjalanan sejarah pengelolaan haji di Indonesia patut menjadi perhatian bersama. Dari sisi pengelolaan pelaksanaan perjalanan ibadah haji pada era pra kolonial belum terorganisir secara resmi, sehingga dari sudut pandang manajemen, perjalanan ibadah haji dikelola hanya ala kadarnya. Zubaedi (2016) menyatakan bahwa pengelolaan perjalanan ibadah haji dianggap sukses jika memenuhi beberapa faktor seperti faktor keamanan, kesehatan, pelayanan petugas, juga peraturan yang tidak tumpang tindih.

Hasil penelitian terdahulu dari Moh. Rosyid (2017), menyatakan bahwa praktek perjalanan haji masyarakat muslim Indonesia sudah dimulai pada abad ke-16. Namun sepulangnya jamaah haji Indonesia ke bumi nusantara, semangat nasionalisme para jamaah semakin meningkat, sehingga pada saat itu nusantara yang sedang dikuasai oleh penjajah. Oleh sebab itu sejarah dan perkembangan perjalanan ibadah haji serta pengelolannya menjadi menarik untuk diketahui, karena pengelolaan haji ke depan tidak akan terlepas dari sejarah panjang proses perjalanan haji umat Islam nusantara. Catatan sejarah dari warisan pengelolaan haji masa pra kolonial, masa kolonial, hingga masa reformasi bisa menjadi bahan untuk perbaikan haji di masa yang akan datang. Di tambah lagi dengan pengelolaan secara modern agar sisi pelayanan, kenyamanan, juga kepuasan jamaah haji dalam melaksanakan ritual ibadah menjadi kunci. Masyarakat Indonesia mulai dari abad yang ke 16 sampai saat ini memiliki aturan pelaksanaan ibadah haji yang berbeda-beda dari tahun ketahun hal ini diakibatkan karena pada masa pra kolonial, kolonial dan sampai saat ini manajemen haji di terapkan karena adanya perbaikan untuk penyesuaian pelayanan sehingga tercipta pelayanan yang nyaman, aman dan profesional.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (1990), metode analisis deskriptif berusaha menginterpretasikan dan menggambarkan objek sesuai dengan fakta dan data yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan

dari sumber-sumber literatur yang kredibel seperti kajian-kajian terdahulu, jurnal-jurnal penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan haji di Indonesia. Setelah data-data tersebut diperoleh lalu dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan 3 tahap, yaitu, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi data.(Moleong, 1990)

C. Pembahasan

1. Sejarah haji di nusantara

Ibadah Haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Mampu yang dimaksud dari segi biaya, fisik dan waktu. Haji terbilang istimewa karena dilaksanakan di mekkah dan dilaksanakan di tanah suci makkah dan di bulan zulhijjah. Berhaji bukan hanya sekedar perjalanan Ibadah, tetapi ikut serta dengan peristiwa-peristiwa lain tidak hanya spiritualitas, tapi menyangkut tentang interaksi sosial, perputaran perekonomian, akulturasi budaya , bahasa dan bangsa. Oleh karena itu menelisik haji lebih penting didorong dengan fenomena yang terjadi hari ini. Masyarakat berbondong-bondong untuk pelaksanaan manasik haji.

Kegiatan ibadah haji pada tahun pertengahan abad ke-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan jamaah sewaktu berada di tanah suci. Bagi kaum yang mempunyai dedikasi atau tinggi terhadap nasib bangsanya mereka lebih memilih untuk tinggal di sana dan mempelajari berbagai bidang ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Bagi mereka yang langsung pulang setelah menunaikan haji tentunya juga memberikan dampak psikologis bagi dirinya sendiri dan memberikan pemahaman lebih mengenai Islam bagi orang lain. Masyarakat indonesia memiliki perubahan pada dirinya Mereka yang belajar di tanah suci pada abad 19 umumnya mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh ilmu yang cukup ada juga yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mengusir penjajah Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi Islam. Masyarakat Indonesia yang menetap lama di mekkah selain untuk menimba ilmu juga untuk mencari dorongan untuk mengusir penjajah Indonesia dengan pergerakan organisasi-organisasi Islam. Pemerintah

kolonial Belanda saat menjajah Indonesia merasa perlu menerapkan kebijakan haji, bahkan mengirimkan seseorang untuk mempelajari dan meneliti kegiatan umat Islam saat melakukan ibadah ini. Tujuan politik ini dilakukan adalah untuk melihat seberapa kuat pengaruhnya bagi pergerakan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama (Suminto, 1986).

Pemerintah kolonial Belanda saat menjajah Indonesia merasa perlu menerapkan kebijakan haji, bahkan mengirimkan seseorang untuk mempelajari dan meneliti kegiatan umat Islam saat melakukan ibadah ini. Tujuan politik itu adalah untuk melihat seberapa kuat pengaruhnya bagi pergerakan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama. Ibadah Haji mempunyai dampak besar terhadap kolonial Belanda karena munculnya organisasi-organisasi perlawanan masyarakat Islam terhadap Belanda, oleh karena itu pemerintah Belanda merasa adanya perlawanan sehingga menerapkan kebijakan haji dan mendelegasikan seseorang untuk memahami apa saja kegiatan umat Islam pada saat pelaksanaan ibadah haji. Banyak kalangan Belanda yang berpendapat bahwa ibadah haji menyebabkan pribumi menjadi fanatik. Untuk lebih membatasi gerak umat Islam, dikeluarkanlah ordonansi yang antara lain berisi, larangan bagi umat Islam Indonesia pergi ke Makkah jika tidak mempunyai pas jalan atau sekarang disebut dengan passport. (Sumuran, 1984)

Dalam hal ini, Snouck Hurgronje berusaha mendudukan masalah antara ibadah haji dan fanatisme. Menurutnya, haji-haji itu tidak berbahaya bagi kedudukan pemerintahan kolonial di Indonesia, yang mungkin sekali berbahaya ialah apa yang disebutnya sebagai koloni Jawa, yaitu daerah tempat tinggal orang-orang yang berasal dari Indonesia di Mekah. Mereka telah menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang persatuan kaum muslimin sedunia dikarenakan pergaulan hidup bertahun-tahun. Di sana mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha Pan-Islamisme. (Noer, 1982) Dari keseluruhan jamaah Haji di Indonesia penjajah Belanda menakuti koloni Jawa karena kolonial Jawa tempat tinggal masyarakat Indonesia yang berada di Makkah yang memiliki wawasan yang tinggi. Dengan begitu haji

sangat ditakuti, hajiphobia sebagai bagian dari Islamophobia. Artinya mereka menganggap bahwa orang berhaji itu adalah orang yang radikal sehingga sangat ditakuti. Dikarenakan adanya pandangan seperti itu maka orang yang akan melaksanakan ibadah haji selalu dihalangi dengan jalan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari penguasa Belanda.(Putuhena, 2007a)

Aktifitas ibadah haji yang dilaksanakan masyarakat Indonesia pada masa kolonial memengaruhi pemikiran politik orang yang menganut agama Islam. Hal itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi politik Islam yang direpresentasikan oleh Syarikat Islam (SI) kemudian berubah menjadi PSII dan Permi (Persatuan Muslimin Indonesia). SI adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1912 oleh seorang haji bernama Samanhudi. SI tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yaitu Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir pada 16 Oktober 1905. Tujuan organisasi ini untuk mengimbangi hegemoni Cina dalam perdagangan batik di Solo serta adanya tekanan politik dari para bangsawan. Adapun Permi yang didirikan pada tahun 1930. Permi merupakan sebuah partai yang pada awal mulanya berbentuk organisasi sosial dan keagamaan dalam bidang pendidikan (karena berkaitan erat dengan Sumatera Thawalib) Permi kemudian mengalami transformasi menjadi partai politik setelah mendapat pengaruh yang kuat dari dua orang tokoh yang menunaikan haji dan belajar di Mesir, yaitu Haji Ilyas Jakub dan Mukhtar Lutfi. Hal yang memunculkan kedua organisasi tersebut salah satunya berasal dari pengaruh ide-ide pemikiran politik Islam di Timur Tengah. Pengaruh pemikiran tersebut dibawa pulang ke Indonesia oleh ulama haji ketika mereka melihat bahwa umat Islam Indonesia sedang mengumpulkan dan menyatukan kekuatan melawan penjajah. Organisasi permi awal mulanya terbentuk dalam bidang pendidikan yang termasuk didalamnya sosial dan pendidikan kemudian beralih menjadi sebuah wadah kepada partai politik hal ini diakibatkan karena penunaian ibadah haji dan belajar di mesir.

Permasalahan-permasalahan yang mendasar dalam kajian ini adalah pengaruh yang timbul dari kaum muslimin sepulang dari menunaikan kewajiban ibadah haji baik sikap politiknya terhadap pemerintah kolonial maupun pemikiran-pemikiran politik Islam di Indonesia. Tahun 1900-1945, merupakan tahun ketika ibadah haji di Indonesia mengalami peningkatan secara drastis. Pemerintah

Hindia belanda mulai khawatir ketika melihat orang-orang dari tanah suci mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu. Perjalanan haji nusantara dahulu tidak sekedar melaksanakan rukun haji tapi mereka banyak menetap di sana dalam waktu lama untuk menumbuh ilmu. yang Kajian ini juga difokuskan pada konsep politik yang bukan sekedar berarti kekuasaan pemerintahan semata, tetapi juga meliputi segala yang mengatur atau mengurus kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama politik, ekonomi, dan pendidikan.(Zallum, 2001)

Dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia yang pertama kali berhaji tertuang dalam naskah Carita Parahiyangan (naskah kuno berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16) dialah Bratalegawa. Ia putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau sang Bunisora, penguasa Kerajaan Galuh (1357-1371). Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Sunda di Pulau Jawa, wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Ci Serayu dan Cipamali (Kali Brebes) di sebelah timur. Kerajaan Galuh meneruskan Kerajaan Kendan di bawah kekuasaan Tarumanagara. Raja Tarumanagara wafat tahun 669 M yang berkuasa sejak tahun 666 M. Hubungan Makkah dengan Nusantara dibuktikan pada 1048/1638 penguasa Banten di Jawa Barat, Abd Qadir (berkuasa 1037-1063/1626-1651) mendapat gelar sultan dari Syarif Makkah sebagai hasil misi khusus yang dikirimkannya ke Tanah Suci. Sultan Banten juga menerima bendera dan pakaian suci (bekas jejak kaki nabi) dari penguasa Haramayn (Azra, 1998:55).

Menurut Putuhena, penduduk Nusantara yang pertama kali menunaikan ibadah haji bukanlah jamaah haji yang bertujuan utama/awal dari Tanah Air. Akan tetapi, mereka yang berdagang, utusan sultan, dan musyafir yang menuntut ilmu ke Hijaz sekaligus berhaji ke Tanah Suci sejak tahun 1503 M (abad ke-16). Perjalanan mereka dengan kapalnya sendiri yang berlabuh di Jeddah (sebagai pelabuhan niaga, bukan pelabuhan haji). Sosok Nurullah (Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati) dari Pasai (yang ditaklukkan Portugis tahun 1521) untuk ke Makkah selama tiga tahun dimanfaatkan pula mengaji dan sekaligus berhaji. Tujuan utama ke Makkah adalah meminta bantuan Kerajaan Turki Utsmani (yang menguasai Makkah) agar mengusir Portugis dari Pasai (2007: 106-107). Dalam perkembangannya, pada abad ke-16 kapal Nusantara buatan Jepara

mengarungi Samudera Hindia yang transit di Aceh dan berlabuh di Jazirah Arab. Mereka melanjutkan pelayaran hingga ke India, Hadramaut, Yaman, dan Jeddah dengan waktu tempuh hingga setengah tahun sekali jalan. Pada abad ke-17 dengan terbukanya jalur Samudera Hindia hingga Laut Merah dan Teluk Persia maka jamaah haji kian meruah didominasi kapal Belanda. Akan tetapi, Belanda menghentikan pengangkutan dengan Bessluit van Agustus 1716. Para jamaah haji selanjutnya mengandalkan kapal niaga secara sembunyi-sembunyi. Pada 1803 terdapat tiga jamaah haji asal Minangkabau yang mengembangkan gerakan Padri untuk memurnikan ajaran Islam di Nusantara. Belanda mencurigai sebagai gerakan perlawanan sehingga keberangkatan calon jamaah haji makin dipersulit.

Pada 1825 Belanda mengeluarkan ordonansi, imbasnya biaya haji sangat tinggi yang mencapai 110 gulden dan mengawasi aktivitas jamaah selama di Makkah. Besarnya animo jamaah haji, kapal Arab dan Inggris ikut terlibat berbisnis pelayaran yang semula kapal layar diganti kapal api. Sejak dibukanya Terusan Suez di Mesir tahun 1869, minat berhaji bangsa Indonesia meningkat. Jamaah haji pun dicurigai membawa ajaran Islam setiba di Tanah Air dengan mengobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Sehingga Belanda membuka konsulat di Jeddah pada 1872 untuk mengawasi gerak jamaah haji Indonesia bila berinteraksi dengan muslim dunia. Mereka di Makkah menerima doktrin perlawanan terhadap kolonial yang identik beragama Kristen. Pada 1866 terdapat 2.000 jamaah dan pada 1896 jumlahnya menjaddi 11.788 orang. Pengawasan jamaah haji Tanah Air selain di Makkah, juga di Kairo Mesir, Kalkutta India, dan Singapura. Untuk mengoptimalkan pengawasan pada jamaah haji setelah kembali di Tanah Air, Belanda mengangkat penghulu sebagai pegawai negeri untuk membantu bupati mengawasinya. Kebijakan makin diperketat Belanda dengan memonopoli pelayaran pada tiga kongsi, *Rotterdamsche Llyod*, *Stoomvaartmatschappij Nederland*, dan *Stoomvaartmatschappij Oceaan* pada 1873. Pada 1874 diterbitkan peraturan oleh Belanda agar hanya yang mampu membeli tiket pergi-pulang dan seizin tertulis dari pangreh praja setempat yang diizinkan berlayar agar tak lama tinggal di Makkah. Setiba di Jeddah Makkah dan sepulang di Tanah Air jamaah melapor pada konsulat Belanda. Pada 1884,

dibuatlah kartu pas perjalanan yang memuat jenis kelamin, umur, tinggi badan, bentuk hidung, mulut, dagu, jenggot atau kumis.(Rosyid, 2017)

2. Dinamika haji di Nusantara: Ordonasi dan resolusi Kolonial

Keadaan sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda masih terbelakang, dikarenakan sistem kolonialisme yang diterapkan bagi bangsa Indonesia terlalu ketat, baik dominasi politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan yang meniru gaya barat, dan kristenisasi penduduk. Di lingkungan desa, hubungan masyarakat masih bersifat komunal, solidaritasnya terutama berdasarkan perasaan bersifat emosional. Diferensiasi dan spesialisasi masih rendah, warga desa pada umumnya adalah petani, maka dalam homogenitas seperti itu berkembanglah sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem sumbangan rewang, tolong menolong, punjungan, atau apa yang lazim secara umum disebut gotong royong.(A. Kartodirdjo, 1999)

Pertanian dilakukan secara tradisional, teknologi yang dipergunakan juga sederhana. Sebagian rakyat masih hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan ekonomi. Perekonomian diorganisir berdasarkan sistem tanam paksa. Menurut sistem ini, pungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor.(S. Kartodirdjo, n.d.) Petani wajib menyerahkan 1/5 dari tanah mereka kepada pemerintah untuk tanaman tertentu, seperti tebu, nila, kopi, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas. Mereka menyerahkan produksi pertanian sebagai upeti atau pajak. Petani juga diwajibkan menyumbangkan tenaganya untuk membangun saluran irigasi, jalan, dan jembatan, membersihkan tanah kosong, bahkan untuk membangun infrastruktur perekonomian pada sebuah pulau.(Lapidus, n.d.) Dalam hal keagamaan sejak semula penduduk pribumi di Hindia Belanda lebih menghargai mistik daripada syariat. Aktivitas mistik lebih dipentingkan daripada menunaikan kewajiban keagamaan. Menurut Snouck, hal ini terjadi dikarenakan masih bercokolnya pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat. Mereka memang beragama Islam, namun mereka tidak menjalankan syariat dan kewajiban agama seperti sembahyang dan puasa. Walaupun

Islam di wilayah Hindia Belanda banyak bercampur dengan kepercayaan animisme dan Hindu, namun orang Islam di wilayah ini pada waktu itu memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. (Suminto, 1996)

Masalah sinkretisme (proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama) agama Islam, terutama di kalangan suku Jawa, disoroti oleh banyak orang. Pada awal abad ke-19, Snouck menyatakan bahwa orang Islam di kawasan ini sebenarnya hanya di permukaan saja memeluk Islam. Umat Islam pada masa penjajahan Belanda diberikan kemerdekaan untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Akan tetapi Belanda akan menindak tegas segala sesuatu yang berhubungan dengan Pan-Islamisme. Memasuki abad ke-19, VOC (VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) Adalah Perkumpulan Perdagangan Belanda Yang Didirikan Pada Tahun 1602 Dan Dibubarkan Tahun 1799. Perkumpulan Ini Berusaha Mencari Laba Sebanyak-banyaknya Dan Sekaligus Menggalang Kekuatan Untuk Melawan Portugis Dan Sp, n.d.) dibubarkan dan Indonesia berada di bawah pemerintah Kerajaan Belanda. Meskipun tidak berhasil dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Setelah di bubarkannya VOC Indonesia berada dalam naungan Belanda, tidak berhasil dalam bidang dagang ternyata berhasil dalam bidang politik perasaan dagang Belanda Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Belanda khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara di lain pihak Belanda meyakini bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah Belanda belum berani mencampuri masalah Islam (Aqib Suminto, n.d.) dan juga belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Keengganan mencampuri masalah Islam ini tercermin dalam undang-undang Hindia Belanda ayat 119 RR Peraturan Pemerintah (*Regeerings Reglement*) yang berisi kebebasan dalam menganut agama dan perlindungan terhadap masyarakat. (Ibid, n.d.-a)

Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten sebab tidak ada peraturan yang jelas mengenai persoalan ini. Dalam masalah haji pemerintah kolonial ikut campur tangan, para haji sering dicurigai dan

dianggap fanatik serta sering dituduh memberontak pemerintah Belanda. Belanda menganggap bahwa fanatisme dalam beraga akan membawa pengaruh besar bagi perjuangan bangsa Indonesia yang mayoritasnya menganut agama Islam. Sebagian besar pemberontakan di Tanah Air memang dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Makkah atau setidaknya dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji. (Putuhena, 2007b) Para ulama merencanakan pemberontakan karena mereka memandang bahwa penguasa Belanda dan penguasa pribumi yang bekerja sama dengan Belanda adalah golongan kafir. Para ulama ini juga menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memobilisasi kekuatan (tindakan pengarah dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional). Meskipun demikian, elit agama pada abad ke-19 ini belum menggunakan Islam sebagai suatu ideologi politik untuk mencapai tujuan dan menata kekuasaan politik. Mereka masih memandang pemerintah penjajah dengan pendekatan syariah atau fiqih, sehingga mereka memandang pemerintah Belanda sebagai pemerintah yang kafir. Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda mengirimkan konsulnya (*Konsul Ini Bertugas Untuk Mengatur Arus Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, Terutama Dengan Berkenaan Kepentingan Pelayaran Pengangkut Jemaah Haji Ataupun Menjaga Wibawa Pemerintah Belanda Di Mata Dunia.*, n.d.) di Jeddah untuk mengatur dan mengawasi warga jajahannya di tanah suci (Suminto, n.d.)

Sejak kedatangan Snouck Hurongje pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai beberapa kebijakan yang jelas mengenai Islam. Menurutnya di dalam Islam tidak mengenal lapisan kependetaan seperti dalam agama Kristen. Kyai tidak apriori fanatik dan penghulu merupakan bawahan pemerintah pribumi. Ulama independen bukanlah komplotan pemberontak, sebab mereka hanya menginginkan ibadah saja. Pergi menunaikan ibadah haji bukanlah berarti fanatik dan berjiwa pemberontak. Snouck menegaskan bahwa pada hakikatnya orang Islam di Indonesia itu penuh damai, namun dia pun tidak buta terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Bagi Snouck, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik (Benda, n.d.) Meskipun agama Islam di Indonesia banyak bercampur dengan unsur animisme dan Hindu, namun Snouck mengetahui bahwa muslim di negeri ini memandang

bahwa agamanya merupakan pengikat kuat yang membedakan dirinya dari orang lain. Dalam bidang politik, pemerintah Belanda dengan tegas menolak setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islamisme. (*Pan Islamisme Adalah Penyatuan Seluruh Dunia Islam Di Bawah Satu Kekuasaan Politik Dan Agama Yang Kepalai Oleh Seorang Khalifah Serta Menghidupkan Rasa Ukhuwah Islamiyah.*, n.d.) Ternyata meskipun di negara Indonesia masyarakatnya bercampur antara Islam, Hindu dan lain-lain. Snouck berpendapat bahwa Islam memiliki ciri khas yang kuat dibagian spiritual sehingga Belanda menolak panatisme dan Pan Islamisme.

Pemerintah kolonial selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi untuk membahayakan kekuasaannya. Berbagai peraturan pemerintahan atau ordonasi yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dan penyelenggaraan di atur oleh kolonial Belanda dengan tujuan mengawasi, membatasi, dan mempersulit perjalanan haji dari Indonesia ke Mekkah. Hal ini dikareknakan oleh tujuan utamanya yaitu agar semangat naik haji dari pribumi menurun dan pembatasan jamaah haji yang akan berangkat ke Mekkah. Hindia Belanda sebagai penerus kekuasaan dari VOC mulai menetapkan peraturan berhaji pertama, harus memiliki pas jalan yang didapatkan oleh penguasa setempat. Kedua, harus mencukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, ketiga, harus melaporkan perpulanagan kepada penguasa setempat, di haruskan mengikuti ujian haji dan apabila lulus ujian akan diberikan sertifikat haji dan pemakaian titel haji diperbolehkan. Pada hal ini para jamaah haji menduduki posisi sangat penting sebagai faktor pembawa besar pengaruh Pan-Islam dari luar, sehingga mereka pun sering dicurigai dan selalu diawasi oleh pemerintah. Pemerintahan kolonial Belanda dalam menjalankan ideologi imperialisme klasiknya sangat bergairah menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia dengan cara memperkuat kekuasaan melalui penguasaan politik dan budaya. Belanda dengan watak imperialistiknya atau penjajahannya tidak bisa melepaskan orientasi kekuasaannya demi memperoleh kehormatan dan harga diri kelas penguasa saja tanpa memedulikan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. (Ricklefs, 2008)

3. Pengaruh Ibadah Haji Terhadap Masyarakat Dalam Bidang Politik, Ekonomi Dan Pendidikan

Ibadah haji merupakan salah satu peribadatan yang mencakup isi peribadatan yang lain dalam agama Islam. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, secara spiritual telah sempurna Islamnya. Islam memandang secara seimbang antara nilai materiil dan nilai spiritual. Seseorang yang telah sempurna amal ibadahnya dengan berhaji akan sempurna pula amal usaha keduniannya. Ibadah haji mempunyai pengaruh besar dalam berbagai bidang seperti bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan. Dan agama Islam dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dalam bentuk interelasi secara fungsional. Pada bentuk hubungan yang demikian Islam berfungsi sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial umat manusia. Ibadah haji ini memberikan dampak yang cukup penting bagi jamaah haji Indonesia karena selain belajar ilmu agama dari Timur Tengah juga menambah ilmu tentang perpolitikan atau strategi untuk mengusir penjajah dari tanah airnya. Para jamaah haji ini pada awalnya yaitu abad XVII dan abad XVIII, belum berperan dalam perlawanan terhadap penjajah, kecuali Syekh Yusuf Makassar, yang baru saja pulang dari Haramain ikut berperang di pihak Sultan Ageng melawan Sultan Haji yang dibantu Belanda. Ada dua aspek negatif mengenai para haji. Pertama, para haji dianggap sebagai orang yang suci karena baru melaksanakan ibadah di tanah haram, sehingga rakyat sederhana menyimpulkan bahwa mereka mempunyai kekuatan gaib. pemerintah Belanda terkadang menganggap bahwa orang Islam yang menunaikan ibadah haji sebagai suatu “golongan pendeta”. Hal ini penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang berhaji di anggap sebagai golongan pendeta karena penjajah belanda hanya mengetahui istilah pendeta di dalam agamanya. Kemudian orang setelah melaksanakan ibadah haji selain peningkatan spiritual juga peningkatan jiwa sosial dan memiliki wawasan luas mengenai pendidikan dan keagamaan.

Secara sosial peranan mereka adalah menghabiskan waktu dengan sembahyang atau melakukan ritual-ritual lainnya. Kedua, adanya unsur politik, para haji memiliki pengaruh politik dan sering berperan sebagai pemimpin suatu gerakan untuk melawan penjajah. Sebagian besar haji memang tidak terkena pengaruh

fanatik di Mekah. Sejak awal mula kedatangannya di Indonesia, Snouck telah berusaha meyakinkan para pejabat kolonial bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan pengaruh haji. Cara mengatasi masalah haji yaitu dengan menghambatnya secara halus dan tidak langsung yakni dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain. Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang kembali dari Mekah. Mereka menginginkan pembersihan praktik-praktik keagamaan yang masih sinkretik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Wahabi di Mekah. Mereka melihat bahwa kaum Wahabi berhasil menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai Islam. Mereka membawa pulang pemikiran baru yang didapatkan di tanah suci dan menerapkan di daerahnya. Gerakan mereka kemudian dikenal dengan Gerakan Padri. Gerakan ini tujuan awalnya memberantas kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan agama seperti berjudi, sabung ayam, menggunakan candu dan minum-minuman keras. Akan tetapi gerakan ini mendapat perlawanan dari para penghulu yang tetap mempertahankan adat. Para penghulu yang anti Padri kemudian meminta bantuan kepada pihak Belanda dan meletuslah perang Padri pada tahun 1821-1832. (Ricklefs, 2008)

Selain itu ada peristiwa yang terjadi pada tahun 1825-1830 di Yogyakarta yaitu perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Meskipun ia belum pernah menunaikan ibadah haji, namun ia mendapat pengetahuan agama dari ulama atau kyai yang pernah melaksanakan ibadah haji. Pangeran Diponegoro yang merasa kecewa karena haknya untuk menjadi sultan Yogyakarta telah dirampas, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap penguasa Yogyakarta yang bertindak tidak adil dengan berencana membuat jalan menerobos tanah miliknya dan makam yang berada di bawahnya. Ia mendapat bantuan dari kalangan santri yaitu Kyai Madja dan menyatakan perlawanannya itu sebagai perang suci melawan pihak kafir. Mereka berpendapat dan memandang bahwa penguasa Yogyakarta telah melakukan penyimpangan agama, termasuk bekerja sama dengan Belanda yang mereka anggap kafir itu. Para ulama Aceh yang lama tinggal di Mekah dan kembali ke Aceh juga mengambil bagian pada perang Aceh pada tahun 1873-1912 Para ulama ikut serta dalam perang sebagai bagian dalam menentang perlawanan agresi Belanda. Selain itu karena

agresi ini dilakukan oleh Belanda yang kafir dan pantas dijawab dengan perang atas nama agama. Ada juga pemberontakan yang dilakukan di Cilegon pada tahun 1888.(Putuhena, n.d.-a)

Peranan para haji dalam pemberontakan ini sangat menonjol. Para haji tercatat sebagai pemimpin yang merencanakan dan mematangkan situasi, seperti Haji Abdul Karim, Haji Marjuki, Haji Tubagus Ismail dan Haji Wasid. Dua ulama yang disebutkan merupakan pemimpin langsung pemberontakan. Pemimpin pasukan pada umumnya dan sebagian anak buah mereka terdiri dari para haji(*Ibid*, n.d.-b)

Di dalam bidang ekonomi haji memiliki pengaruh yang cukup besar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh rakyat yang ingin melaksanakan ibadah haji adalah berhemat, menabung dan kerja keras. Sebagian besar jamaah haji di wilayah Hindia Belanda yang berangkat setiap tahun ke tanah suci sebenarnya belum mempunyai bekal materi yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji yang demikian ini disebut "haji miskin" oleh orang Arab di Hijaz. Adanya daya tarik haji yang kuat, seakan-akan mendorong mereka untuk memaksakan diri pergi ke Mekkah, meskipun biaya yang dibutuhkan kurang memadai.(*Ibid*, n.d.-c) Penulis menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat jamaah haji berangkat memiliki keterbatasan pada bagian material oleh karena itu hal ini sering disebut oleh orang Arab sebagai haji miskin, meskipun demikian keinginan yang kuat untuk menunaikan ibadah haji membuat masyarakat wilayah Hindia Belanda bekerja keras dan berhemat.

Adanya daya tarik haji yang kuat, seakan-akan mendorong mereka untuk memaksakan diri pergi ke Mekkah, meskipun biaya yang dibutuhkan kurang memadai. Banyak di antara dari jamaah haji yang sebelum berangkat ke tanah suci, mereka bekerja sebagai buruh perkebunan karet dan kelapa sawit di Singapura. Mereka menumpang kapal dagang untuk sampai ke Singapura. Para calon jamaah haji ini terdorong untuk melakukan pekerjaan ini agar mereka dapat mengumpulkan bekal yang cukup untuk berangkat haji. Akan tetapi banyak dari mereka yang meninggalkan pekerjaan itu setelah menunaikan ibadah haji. Ketika kembali ke kampung halaman, mereka telah membawa berbagai

pengalaman dan pengetahuan sebagai buruh perkebunan tentang menanam kelapa sawit dan karet. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang haji inilah yang memperkenalkan penanaman karet di Sumatera dan Kalimantan. (*Ibid*, n.d.-d) Penanaman karet dan kelapa sawit merupakan salah satu fungsi ekonomi terpenting dari haji. Seorang haji yang telah kembali dari Mekah ke Tanah Air akan berusaha agar anggota keluarga yang lain dan keluarganya sendiri bisa melaksanakan haji pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, usaha mereka tidak berhenti sampai di sini. Mereka berusaha mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan menggunakannya dengan hemat sehingga ia bisa menabung. Banyak dari calon haji yang pada awalnya jarang untuk menabung, kemudian mereka menyisihkan sebagian uangnya sedikit demi sedikit hingga perjalanan yang sudah lama mereka idam-idamkan dan yang akan memberikan tempat di mata masyarakat untuk selama sisa hidupnya bisa tercapai. (Hurgronje, 1993) Dari hasil usaha kegiatan perekonomian yang sebenarnya belum memuaskan tersebut, mereka akan menabung sampai beberapa tahun untuk biaya mereka naik haji. Pada akhirnya mereka menjadi sebuah golongan baru dan terjadi perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat desa. Haji telah menciptakan sebuah etos bagi umat Islam yaitu kerja keras dan hemat, perubahan budaya ekonomi dari jasa ke uang, menciptakan lapangan pekerjaan serta pengenalan transaksi ekonomi antardaerah. Dalam hal keagamaan mereka juga mengembangkan usahanya dengan mengajar di madrasah-madrasah keagamaan yang juga merupakan sumber penghasilan penting (Kartodirjo, 1984)

Perjalanan haji dari kepulauan Nusantara menuju ke tanah suci telah memengaruhi berdirinya beberapa perusahaan pelayaran khusus pengangkutan calon jamaah haji. Perusahaan pelayaran untuk pengangkutan jamaah haji dari Hindia Belanda dimulai pada tahun 1825 pedagang Arab memiliki perusahaan pelayaran yang dilakukan oleh Syaikh Umar Bugis (*Ibid*, n.d.-e) Pada tahun 1874, pengangkutan jamaah haji juga diramaikan oleh perusahaan pelayaran milik pemerintahan Inggris dengan pelabuhan embarkasi Singapura. Melihat Inggris dan pedagang Arab yang meraup keuntungan besar dari bisnis pelayaran ini, Belanda yang sebelumnya enggan untuk mengurus masalah pengangkutan haji pada akhirnya mendirikan tiga perusahaan pengangkutan jamaah haji.

Tiga perusahaan tersebut adalah Nederland, Rotterdamsche Llyod, dan Ocean Maatschappij. (*Ibid*, n.d.-f) Ibadah Haji mempunyai pengaruh besar terhadap negara Indonesia terutama di bagian pelayaran hal ini di akibatkan karena pelayaran termasuk alat transportasi dari Mekkah ke Indonesia. Sebagian dari jamaah haji yang sudah selesai melaksanakan haji, banyak dari mereka yang menetap di Mekah selama beberapa tahun lamanya untuk menuntut ilmu dan mereka disebut sebagai muqimin. Para muqimin ini oleh penduduk setempat disebut Jawah atau Jawi (orang Jawa) yang bentuk jamaknya Jawwiyin (orang-orang Jawa). Jumlah mereka semakin banyak dikarenakan setiap musim haji banyak jamaah yang menetap di Makkah. Pada awal abad ke XX, telah terjadi perubahan signifikan dalam sistem pendidikan agama di Hindia Belanda. Perubahan ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan seperti di Mesir dan Hijaz yang diperkenalkan oleh sebagian haji yang telah pulang ke Tanah Air setelah menyelesaikan pendidikan. Para haji ini memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan pendidikan keagamaan di Hindia Belanda. Di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 1907 didirikan sebuah sekolah yang bernama Adabiyah School/ Madrasah Adabiyah (sekolah peradaban). Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad, seorang pedagang tekstil yang pernah tinggal di Mekah selama empat tahun (1895-1999). (Noer, 1982b)

Madrasah ini didirikan atas usul dari teman studi Haji Abdullah Ahmad di Kairo dan Mekah yaitu Thaher Jallaludin yang bertemu dengannya di Singapura tahun 1906. Madrasah ini bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang terpelajar, tidak bertaqlid dan bid'ah serta berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadist. Selain itu di Padang juga terdapat Surau Jembatan Besi, yaitu sekolah yang memberikan pelajaran agama dengan cara-cara tradisional. Fiqh dan tafsir Quran merupakan pelajaran utama di sekolah ini. Ketika Haji Rasul Syaikh Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad masuk ke sekolah ini pada 1904, pelajaran yang ditekankan adalah pelajaran ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya (*Ibid*, n.d.-g) ternyata Rasul pernah tinggal dan melakukan studi di Mekkah selama beberapa tahun sebelum ia mengajar di Surau Jembatan Besi. Di Yogyakarta terdapat tokoh yang sangat berpengaruh dalam perubahan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia

yaitu Ahmad Dahlan. Ia juga tercatat sebagai seorang haji dan tinggal selama beberapa lama di Mekah untuk melanjutkan studinya. Ahmad Dahlan juga pernah mendirikan sekolah di kraton Yogyakarta dengan pengantar bahasa Arab, namun usaha ini tidak berhasil. Pada 1 Desember 1911, K.H Ahmad Dahlan berhasil mendirikan sebuah sekolah yang berdasarkan sistem pemerintah Belanda. Di sekolah ini ia mengajar pelajaran agama, sedangkan untuk mata pelajaran sekuler diajar oleh beberapa guru pribumi. (Putuhena, n.d.-b) Dibidang keagamaan juga memiliki dampak yang sangat besar hal dikarenakan jamaah haji yang sepulang dari makkah mempunyai bekal yang kokoh untuk meningkatkan keagamaan masyarakat Indonesia karena telah banyak menuntut ilmu di makkah. Selain keagamaan bangsa indonesia meningkatkan selepas pelaksanaan ibadah haji ternyata peningkatan sosial juga meningkat.

D. Penutup

Haji memengaruhi sikap pemerintah Hindia Belanda dalam penerapan politik kolonialisasinya. Belanda memandang masalah sebagai ibadah yang sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Haji menjadi ibadah yang ditakuti sehingga harus dilarang dan dihalangi. Melalui konsulnya di Jeddah, pemerintah Belanda berupaya selalu mengawasi kegiatan mereka yang pergi ke tanah suci yang berasal dari Hindia Belanda.

Pengaruh haji pada awal abad ke 19 telah memunculkan sikap dan pemikiran politik yang lama-kelamaan menjadi sebuah organisasi politik. Orang Islam yang setelah haji belajar di Kairo, mereka membawa berbagai pemikiran politik yang didapatkan dari studi di Mesir itu ke Tanah Air. Dalam perlawanannya kepada pemerintah Belanda mereka memobilisasi masa serta menggunakan simbol-simbol keagamaan.

Haji mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap munculnya perkembangan pendidikan dan perekonomian. Dalam bidang ekonomi, haji telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan melalui etos kerja dan hemat. Haji telah mendorong pertumbuhan dan mendatangkan keuntungan dalam berbagai

sektor ekonomi. Dalam bidang pendidikan peran serta haji telah memperkenalkan berbagai macam pendidikan keagamaan. Dari model pendidikan yang menggunakan sistem klasikal maupun model pendidikan modern yang mirip dengan sekolah orang-orang Barat

Pustaka Acuan

- Aqib Suminto. (n.d.). *Politik Islam*.
- Benda. (n.d.). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*.
- Hurgronje, S. (1993). " *Politik Haji? " terj. Soedarso Soekarno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jld. VIII. INIS.*
- Kartodirdjo, A. (1999). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium. Gramedia Utama.*
- Kartodirdjo, S. (n.d.). *Pengantar Sejarah*.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888. Pustaka Jaya.*
- Konsul ini bertugas untuk mengatur arus perjalanan jemaah haji indonesia, terutama dengan berkenaan kepentingan pelayaran pengangkut jemaah haji ataupun menjaga wibawa pemerintah Belanda di mata dunia. (n.d.).*
- Lapidus. (n.d.). *Sejarah Sosial Umat Islam*.
- Moleong, L. J. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.*
- Noer, D. (1982a). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1941. LP3ES.*
- Noer, D. (1982b). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. LP3ES.*
- Pan Islamisme adalah penyatuan seluruh dunia Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang kepalai oleh seorang khalifah serta menghidupkan rasa ukhuwah Islamiyah. (n.d.).*

- Putuhena. (n.d.-a). *Historiografi Haji*.
- Putuhena. (n.d.-b). *Historiografi Haji*.
- Putuhena, M. S. (2007a). *Historiografi Haji Indonesia*. LKiS.
- Putuhena, M. S. (2007b). *Historiografi Haji Indonesia*. LKiS.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Serambi.
- Rosyid, M. (2017). Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal. *Jurnal Ijtihad*, vol 17, 245–246.
- Suminto, A. (n.d.). *Politik Islam*.
- Suminto, A. (1986). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES.
- Suminto, A. (1996). *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES.
- Sumuran, M. M. (1984). *Lintasan Sejarah Jamaah Haji Indonesia*. MARS-26.
- VOC (*Verenigde Oost Indische Companie*) adalah perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Perkumpulan ini berusaha mencari laba sebanyakbanyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Sp. (n.d.).
- Zallum, A. Q. (2001). *Pemikiran Politik Islam*. Al-Izzah.